

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaannya lebih lanjut diatur ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dalam peraturan dimaksud diamanatkan bahwa Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Renja PD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan PD.

Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang disusun untuk periode tahun 2021 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) PD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, sehingga penyusunan Renja PD dilakukan secara silmutan/paralel dengan Penyusunan Rancangan Awal RKPD.

Renja PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah disusun agar dapat memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama dalam tahun anggaran 2021 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian akan dapat memberikan gambaran tentang arah dan tujuan program, target kinerja yang akan dicapai serta kegiatan pelayanan sosial yang akan dilaksanakan.

Penyusunan Renja PD merupakan proses awal dari penyusunan perencanaan program dan anggaran PD yang akan terkait dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, sehingga program dan kegiatan yang tertuang di dalam Renja PD akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD Tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2021;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar Pembangunan Kalimantan Tengah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renja PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan Program Tahun Anggaran 2021, yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran.

2. Tujuan

- a. Memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2021.
- b. Merencanakan target dan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 ini, disusun terdiri dari 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2019, terdiri dari evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2019 dan capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, terdiri dari telaahan terhadap kebijakan nasional, dan tujuan dan sasaran Renja PD.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN, memuat uraian tentang indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif, dan sumber dana dari program dan kegiatan PD yang akan dilaksanakan.

BAB V PENUTUP memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019 dan Capaian Renstra PD

Pada Tahun Anggaran 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mengelola anggaran sebesar **Rp. 26.331.440.776,-** (Dua puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) **Rp. 9.486.107.142,-** (Sembilan milyar empat ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) dan Belanja Langsung (BL) **Rp. 18.702.422.043,-** (Delapan belas milyar tujuh ratus dua juta empat ratus dua puluh dua ribu empat puluh tiga rupiah).

Adapun tingkat Capaian dan Realisasi anggaran dimaksud adalah sebagai berikut :

Dana APBD Provinsi

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Relisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<i>12.543.872.605</i>	<i>12.401.178.586</i>	<i>98,86</i>	<i>99,83</i>
	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	149.422.043	145.082.534	97,10	100,00
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	650.000.000	649.700.000	99,45	100,00
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	3.000.000	2.786.000	92,87	100,00
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30.000.000	12.305.200	41,02	42,00
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	565.710.000	544.860.000	96,31	100,00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	116.000.000	115.992.000	99,99	100,00
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00
	Penyediaan alat tulis kantor	41.000.500	41.000.500	100,00	100,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.650.000	21.650.000	100,00	100,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25.000.000	21.380.000	85,52	100,00
	Penyediaan makanan dan minuman	25.250.000	25.246.100	99,98	100,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	683.164.200	680.596.742	99,62	100,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	551.075.300	550.879.000	99,96	100,00
	Biaya pembayaran instruktur senam	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Relisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	(%)
	Rujukan berobat PNS	0	0	0,00	0,00
	Rapat Koordinasi/Konsultasi/Rakernis	431.700.000	408.614.909	94,65	100,00
	Penyediaan jasa tenaga kontrak	8.870.478.519	8.801.138.201	99,22	100,00
	Pengembangan dan Pengelolaan Website Kantor	329.422.043	328.947.400	99,86	100,00
2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<i>215.000.000</i>	<i>214.907.100</i>	<i>99,96</i>	<i>100,00</i>
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0	0,00	0,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	200.000.000	199.907.100	99,95	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<i>760.898.000</i>	<i>758.345.452</i>	<i>99,66</i>	<i>99,97</i>
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	200.598.000	200.516.000	99,96	100,00
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	121.800.000	121.800.000	100,00	100,00
	Koordinasi dan Kerjasama Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lainnya	189.500.000	188.974.300	99,72	100,00
	Rapat Koordinasi Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah	125.000.000	123.155.650	98,52	100,00
	Pelaksanaan kerjasama dengan instansi vertikal dan lainnya dalam penguatan peran dan fungsi Satpol PP	124.000.000	123.899.502	99,92	100,00
	Rapat koordinasi gelar perkara dan pembinaan aparat PPNS Satpol PP secara berkala	0	0	0,00	0,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<i>1.319.100.000</i>	<i>1.279.820.833</i>	<i>97,02</i>	<i>100,00</i>
	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000	41.068.654	82,14	100,00
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	80.700.000	79.443.860	98,44	100,00
	Pendataan kebutuhan pelatihan dasar	93.300.000	91.876.033	98,47	100,00
	Bimtek Kewaspadaan Dini	122.600.000	119.155.945	97,19	100,00
	Kesamaptaan	418.750.000	411.713.781	98,32	100,00
	Penyuluhan penegakan Perda dan Pergub	105.000.000	99.716.630	94,97	100,00
	Pembinaan kedisiplinan anggota Satpol PP	65.000.000	64.740.000	99,60	100,00
	Pengembangan kapasitas anggota Satpol PP	83.750.000	80.499.430	96,12	100,00
	Bimbingan teknis pemberkasan, teknik pemeriksaan tersangka, saksi dan ahli	300.000.000	291.606.500	97,20	100,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<i>310.151.438</i>	<i>305.031.590</i>	<i>98,35</i>	<i>100</i>
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	7.377.000	7.317.000	99,19	100,00
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.873.000	10.873.000	100,00	100,00
	Penyusunan RKA-SKPD	20.000.000	19.997.200	99,99	100,00
	Penyusunan LAKIP	81.323.481	80.870.940	99,44	100,00
	Penyusunan renja SKPD	80.577.957	80.550.600	99,97	100,00

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Relisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	(%)
	Penyusunan LKPJ dan LPPD	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
	Pembinaan Pejabat Pengelolaan Informasi (PPID) Daerah	90.000.000	85.422.850	94,91	100,00
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	848.400.000	833.479.355	98,24	100,00
	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	299.000.000	296.303.804	99,10	100,00
	Pemberdayaan sistem keamanan lingkungan	120.000.000	64.208.000	98,78	100,00
	Pembuatan database linmas se-Kalteng	124.300.000	117.319.500	94,38	100,00
	Pemantauan Fungsi Linmas dalam Penyelenggaraan Keamanan Pilkada/ Pileg/Pilpres	165.900.000	164.070.600	98,90	100,00
	Pembinaan Pelaku Usaha	67.400.000	67.332.501	99,90	100,00
	Pembuatan database daerah potensi rawan bencana se-Kalteng	71.800.000	70.837.450	98,66	100,00
7	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2.705.000.000	2.656.435.699	98,20	100,00
	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	732.900.000	731.801.100	99,85	100,00
	Penegakan pelaksanaan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah	940.000.000	911.737.811	96,99	100,00
	Inventarisasi Data Perundangan/Perda/ Pergub	720.000.000	702.249.122	97,53	100,00
	Koordinasi dan kerjasama kantrantibmas terpadu	95.000.000	94.250.166	99,21	100,00
	Pengendalian unjuk rasa dan konflik sosial	40.800.000	40.657.500	99,65	100,00
	Penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	39.060.000	39.055.000	99,99	100,00
	Pengamanan barang bukti	137.240.000	136.685.000	99,60	100,00
	JUMLAH	18.702.422.043	18.449.198.615	98,65	99,81

Secara keseluruhan, target pelaksanaan Renja Tahun 2019 khususnya yang bersumber dana APBD untuk Belanja Langsung (BL) dapat tercapai, dan dapat diketahui dari pencapaian Prosentase Penyerapan Anggaran sebesar **98,65%** (Sembilan puluh delapan koma enam puluh lima persen) dan Prosentase fisik mencapai **99,81 %** (Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen).

Sehingga beberapa kegiatan terdapat sisa anggaran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 142.694.019,-** (Seratus empat puluh dua juta enam ratus

sembilan puluh empat ribu sembilan belas rupiah) atau **1,14 %** (satu koma empat belas persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 92.900,-** (Sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atau **0,04 %** (nol koma nol empat persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 2.552.548,-** (Dua juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) atau **0,34 %** (nol koma tiga puluh empat persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 39.279.167,-** (Tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) atau **2,98 %** (dua koma sembilan puluh delapan persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 5.119.848,-** (Lima juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) atau **1,65 %** (satu koma enam puluh lima persen) dari pagu anggaran yang tersedia..
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, terdapat sisa anggaran **Rp. 14.920.645,-** (Empat belas juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) atau **1,76 %** (satu koma tujuh puluh enam persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, terdapat sisa anggaran **Rp. 48.564.301,-** (Empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus satu rupiah) atau **1,80 %** (satu koma delapan puluh persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang semaksimal mungkin sesuai dengan pagu anggaran yang sudah tersedia.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2019
Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2021				
					Target Renja PD 2019	Realisasi Renja PD 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)			
1	05												
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI											
1	1	05	01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>									
1	05	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat menyurat dan pembelian materai	600	400	100	100	100	200	33,33	
1	05	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan jasa telepon, listrik dan akses internet	18	12	3	3	100	3	6	33,33
1	05	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	64	28	11	11	100	0	11	17,19
1	05	01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terbayarnya asuransi bangunan gedung kantor	12	8	2	2	100	2	4	33,33
1	05	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional	86	50	13	13	100	23	36	41,86

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	
					Target Renja PD 2019	Realisasi Renja PD 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1 05 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya penyediaan jasa pengelola administrasi keuangan	736	286	170	170	100	170	340	46,20
1 05 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya honor petugas kebersihan kantor dan perlengkapannya	18	7	3	3	100	3	6	33,33
1 05 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terbayarnya biaya jasa service peralatan kantor	34	13	5	5	100	5	10	29,41
1 05 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	302	132	50	50	100	50	100	33,11
1 05 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya bahan cetak dan penggandaan	42	19	7	7	100	7	14	33,33
1 05 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	35	11	5	5	100	5	10	28,57
1 05 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan koran bagi pegawai	21	7	3	3	100	3	6	28,57
1 05 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman bagi tamu kantor	600	300	100	100	100	100	200	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2020				
					Target Renja PD 2019	Realisasi Renja PD 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)			
1	05	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	360	70	60	60	100	60	120	33,33
1	05	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	470	225	75	75	100	75	150	31,91
1	05	01	35	Rujukan berobat PNS	Tersedianya dana rujukan berobat PNS ke luar daerah	70	10	5	0	0	5	5	7,14
1	05	01	38	Rapat Koordinasi/Konsultasi/ Rakernis	Terpenuhinya rapat koordinasi/konsultasi/rakernis Pol PP 14 Kabupaten/Kota	250	90	30	30	100	30	60	24,00
1	05	01	71	Pengembangan dan Pengelolaan Website Kantor	Teraksanannya media informasi online Satpol PP Provinsi Kalteng yang up to date	4	1	1	1	100	1	2	50,00
2	1	05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1	05	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Terpenuhinya pengadaan Kendaraan Dinas	34	0	0	0	0	2	2	5,88
1	05	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	22	8	4	4	100	4	8	36,36
1	05	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	62	28	10	10	100	10	20	32,26
1	05	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	72	32	12	12	100	12	24	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (ouput	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2020		
					Target Renja PD 2019	Realisasi Renja PD 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)	
3	1 05 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	1 05 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas pegawai, tenaga kontrak dan cleaning service Satpol PP	885	576	306	306	100,00	306	612	69,15
	1 05 03 15	Koordinasi dan Kerjasama Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur lainnya	Terselenggaranya koordinasi dan kerjasama penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur lainnya	28	7	7	7	100,00	7	14	50,00
	1 05 03 16	Rapat Koordinasi Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi optimalisasi penegakan peraturan daerah	16	4	4	4	100,00	4	8	50,00
4	1 05 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
	1 05 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai Satpol PP	250	210	60	60	100	60	120	48,00
	1 05 05 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	200	130	50	50	100	50	100	50,00
	1 05 05 116	Pendataan kebutuhan pelatihan dasar	Terselenggaranya pendataan Diksar di 14 Kabupaten/kota	70	28	14	14	0	14	28	40,00
	1 05 05 119	Bimbingan teknis pengendalian anti huru hara	Terselenggaranya bimbingan teknis pengendalian huru hara	200	80	0	0	0	0	0	0,00
	1 05 05 144	Bimtek Kewaspadaan Dini	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Kewaspadaan Dini	200	50	50	50	0	50	100	50,00
	1 05 05 147	Kesamaptaan	Terselenggaranya Kegiatan Kesamaptaan bagi Aparatur Satpol PP	400	40	40	40	0	40	80	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	
					Target Renja PD 2019	Realisasi Renja PD 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
5	1 05 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	1 05 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	12	8	2	2	100	2	4	33,33
	1 05 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6	3	1	1	100	1	2	33,33
	1 05 06 06	Penyusunan RKA-SKPD	6	5	2	2	100	2	4	66,67
	1 05 06 14	Penyusunan LAKIP	6	7	4	4	100	4	8	133,33
	1 05 06 15	Penyusunan renja SKPD	6	5	2	2	100	2	4	66,67
	1 05 06 35	Penyusunan LKPJ dan LPPD	12	8	2	2	100	2	4	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	
					Target Renja PD 2019	Realisasi Renja PD 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
6	1 05 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan								
1	05 15 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	565	205	120	120	100	120	240	42,48
1	05 15 23	Pemberdayaan sistem keamanan lingkungan	300	15	50	50	100	50	100	33,33
1	05 15 27	Forum komunikasi dan konsultasi	199	30	0	0	0	0	0	0,00
1	05 15 29	Pembuatan database anggota linmas	5	2	1	1	100	1	2	40,00
1	05 15 31	Pemantauan Fungsi Linmas Dalam Penyelenggaraan Keamanan Pilkada/Pileg/Pilpres	4	2	1	1	100	1	2	50,00
1	05 15 35	Pembinaan Pelaku Usaha	4	2	1	1	100	1	2	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2020		
					Target Renja PD 2019	Realisasi Renja PD 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)	
7	1 05 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal									
	1 05 16 01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	Terbayarnya honorarium jaga/pengamanan VIP, aset dan pejabat-pejabat Pemprov Kalteng	720	360	120	120	100	120	240	33,33
	1 05 16 03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	Meningkatnya kemampuan aparat Satpol PP	240	50	0	0	0	0	0	0,00
	1 05 16 08	Penegakan pelaksanaan perda/pegub di kabupaten/kota provinsi kalimantan tengah	Terpenuhinya kegiatan penegakan Perda/Pegub di Kab/Kota se-Kalteng	84	42	14	14	100	14	28	33,33
	1 05 16 22	Operasi patroli wilayah trantibum	Terlaksananya operasi patroli trantibum	150	14	0	0	0	0	0	0,00
	1 05 16 24	Inventarisasi data perundangan/perda/pegub	Tersusunnya data-data Perda/Pegub Kab/Kota se-Kalteng	84	42	14	14	100	14	28	33,33
	1 05 16 25	Monev/evaluasi/pelaporan	Terciptanya administrasi kegiatan Pol PP	84	28	0	0	0	0	0	0,00
	1 05 16 29	Pengendalian Unjuk Rasa dan Konflik Sosial	Terlaksananya Pengendalian Unjuk Rasa dan Konflik Sosial di Masyarakat	80	20	20	20	100	20	40	50,00
	1 05 16 30	Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Terlaksananya Penegakan Kanstrantibmas di Lingkungan Masyarakat	80	20	20	20	100	20	40	50,00

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, dapat disampaikan beberapa kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut yaitu :

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Koordinasi dan Kerjasama Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lainnya, Rapat Koordinasi Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah, dan Rapat Koordinasi Gelar Perkara dan Pembinaan Aparat PPNS Satpol PP secara Berkala.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal, Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, Pendataan Kebutuhan Pelatihan Dasar, Bimtek Kewaspadaan Dini, Kesamaptaan, Penyuluhan Penegakan Perda dan Pergub, Pembinaan Kedisiplinan Anggota Satpol PP, Pengembangan Kapasitas Anggota Satpol PP, dan Bimbingan Teknis Pemberkasan, Teknik Pemeriksaan Tersangka, Saksi dan Ahli.

3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Pemberdayaan Sistem Keamanan Lingkungan, Pembuatan Database Linmas se-kalteng, Pemantauan Fungsi Linmas Dalam Penyelenggaraan Keamanan Pilkada/Pileg/Pilpres, Pembinaan Pelaku Usaha, Pembuatan Database Daerah Potensi Rawan Bencana se-Kalteng.

4. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Program Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal program yang dilaksanakan meliputi Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja, Penegakan Pelaksanaan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Inventarisasi Data Perundangan/Perda/Pergub, Koordinasi dan Kerjasama Kantrantibmas Terpadu, Pengendalian Unjuk Rasa dan Konflik Sosial, Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan Pengamanan Barang Bukti.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan pelayanan sebagai unsur staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah dibidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

1. Memberikan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah.
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban masyarakat
3. Melakukan Pemeriksaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Memberikan Pembinaan disiplin dalam rangka menertibkan dan menindak warga masyarakat yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.
5. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
7. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah.

b. Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan

Dalam pelaksanaan Analisa identifikasi lingkungan internal dan Analisa identifikasi lingkungan Eksternal pada Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dengan pendekatan S W O T, yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat KEKUATAN (Strength) dan KELEMAHAN (Weakness) yang akan dilakukan, apa yang menjadi PELUANG (OPPORTUNITIES) dan TANTANGAN (THREATS) Dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

1. **Lingkungan Internal.**
 - a) Kekuatan (Strength)

- 1) Dasar Hukum Keberadaan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - 2) Komitmen Masyarakat yang anti KKN dan Akuntabilitas Publik ;
 - 3) Tersedianya kualitas SDM Aparatur Polisi Pamong Praja di Provinsi, Kabupaten, Kota se - Kalimantan Tengah ;
 - 4) Tersedianya dukungan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong Praja yang memadai ;
 - 5) Terjalannya kondisi dan hubungan kemitraan dengan POLRI, Kabupaten/Kota, Kiai, Ulama dan Tokoh Masyarakat se-Kalimantan Tengah ;
 - 6) Terjalannya kerja sama dengan Aparatur Keamanan (POLRI) dan instansi terkait untuk terciptanya situasi Kalimantan Tengah yang kondusif ;
 - 7) Tingginya kesadaran sikap dan budaya terbuka masyarakat Kalimantan Tengah.
- b) Kelemahan (Weakness).
- 1) Keterlambatan penetapan/kurangnya Peraturan Pemerintah/ Protap Tentang Polisi Pamong Praja ;
 - 2) Belum mantapnya materi (Silabi) secara jelas mengenai pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja ;
 - 3) Belum Optimalnya tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Operasional lapangan Trantibum ;
 - 4) Belum Optimalnya dedikasi dan loyalitas SDM Polisi Pamong Praja terhadap Tugas ;
 - 5) Anggota Polisi Pamong Praja masih ada yang belum mengikuti Pelatihan dan Pendidikan PPNS dan DIKLAT Polisi Pamong Praja;
 - 6) Pelaksanaan Tugas Polisi Pamong Praja di lapangan yang masih belum sesuai dengan Prosedur tetap (PROTAP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
 - 7) Kurangnya kerjasama sosial dan meningkatnya penduduk miskin.
 - 8) Padatnya jumlah penduduk dan penyerapan angkatan kerja yang kurang di Kalimantan Tengah.

2. Lingkungan Eksternal

- a. Peluang (Opportunities)
 - 1) Meningkatnya tingkat pendidikan ;
 - 2) Mantapnya kerukunan warga masyarakat ;
 - 3) Kehidupan Masyarakat yang semakin demokratis diharapkan akan mendorong terciptanya kondisi keamanan yang tertib, aman dan tenteram ;
 - 4) Adanya semangat reformasi dan paradigma baru ;
 - 5) Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dan partisipasi masyarakat ;
 - 6) Tumbuh kesempatan yang luas untuk berprasangka mengambil keputusan ;
 - 7) Terjadinya hubungan dengan aparaturnya POLRI (Eksekutif dan Yudikatif), Dinas dan Badan, serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

- b. Ancaman (Threats)
 - 1) Pengaruh Negatif dengan adanya persaingan Era Globalisasi ;
 - 2) Tuntutan Penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance) ;
 - 3) Tuntutan Kualitas dan Kuantitas pelayanan Publik ;
 - 4) Kontrol sosial semakin meningkat ;
 - 5) Lemahnya Koordinasi ;
 - 6) Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana hasil pembangunan yang merata akan dapat meningkatkan mobilitas kejahatan ;
 - 7) Krisis ekonomi multi dimensi dapat menyebabkan naiknya tingkat kejahatan di masyarakat ;
 - 8) Terbatasnya Instansi Pemerintah dan Perusahaan Swasta dalam penerimaan tenaga kerja ;
 - 9) Terputusnya sektor usaha perdagangan dan pabrik-pabrik pada kota / lokasi tertentu ;
 - 10) Krisis ekonomi multi dimensi yang belum juga pulih sehingga dapat menyebabkan naiknya tingkat kejahatan di masyarakat.

c. Analisis Strategis dan Pilihan

Setelah dipilih dan ditetapkan Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) dari analisa identifikasi lingkungan eksternal tersebut maka diperoleh suatu kesimpulan Asumsi Analisa SWOT sebagai berikut :

1. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Perlu adanya penyamaan persepsi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.
3. Perlu tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan Profesional.
4. Perlu adanya semangat kerja dan disiplin yang tinggi bagi setiap aparatur penyelenggara Pemerintahan.
5. Perlu tersedianya anggaran dan sarana prasarana kerja yang cukup.
6. Perlu peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan simplifikasi Program penanganannya.
7. Perlu penataan kewenangan penanganan trantibum dan penegakan Perda.

Dengan demikian maka, lingkungan strategis tersebut, sangat mempengaruhi tingkat kelancaran dan menunjang tugas-tugas Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah termasuk didalamnya akan mempengaruhi apakah peningkatannya sarana dan prasarana serta peningkatan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja akan meningkatkan dengan kondisi ketenteraman dan ketertiban di Provinsi Kalimantan Tengah yang kondusif dengan mewujudkan Good Governance dapat dilaksanakan dengan baik.

d. Dampak Terhadap Visi dan Misi Pembangunan Provinsi

Menyebabkan target yang ingin di capai dalam jangka waktu tertentu, tidak dapat dicapai sesuai rencana. Hal ini dapat diukur dengan capaian target SPM yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

e. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat mencapai hasil yang optimal sangat ditentukan oleh beberapa faktor pendukung serta penunjang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktor Sarana dan Prasarana Operasional di lapangan

Faktor sarana dan prasarana pendukung operasional di lapangan mempunyai peranan yang cukup penting serta signifikan dalam upaya pencapaian hasil yang lebih optimal, disamping itu dengan terpenuhinya sarana prasarana dan perlengkapan operasional di lapangan akan

memberikan semangat lebih serta etos kerja yang diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Sarana dan Prasarana dimaksud diatas meliputi :

- a) Kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2.
 - b) Perlengkapan Personil yang memadai dan sesuai dengan ketentuan serta prosedur tetap (Protap) Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c) Pemberian Insentif yang memadai sesuai dengan unsur resiko yang dibebankan kepada personil Satpol-PP.
2. Pembiayaan yang bersumber dari dana APBD perlu ditingkatkan sehingga bisa melaksanakan keseluruhan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja melalui berbagai program dan kegiatan yang selama ini belum dilaksanakan agar lebih mendekati kebutuhan ideal dari perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 3. Peningkatan kapasitas serta kuantitas dari personil Satuan Polisi Pamong Praja yang ideal untuk lingkup provinsi sebagai rujukan untuk Satpol PP Kota Palangka Raya mempunyai jumlah personil Satpol PP sebanyak 188 orang sedangkan kondisi saat ini untuk Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah baru memiliki secara keseluruhan berjumlah 384 terdiri dari PNS 75 Orang dan Tenaga Kontrak 309 Orang personil Satpol PP.
 4. Lemahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pemahaman Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur serta peraturan Kepala Daerah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas, sehingga kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan evaluasi terhadap Program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2019 yang dikaitkan dengan kegiatan yang sama yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020, dapat dikaji beberapa permasalahan yang dianggap penting untuk disempurnakan di masa mendatang yaitu :

- Peningkatan kapasitas serta kualitas dan Kuantitas Personil Satpol PP perlu mendapat perhatian yang tinggi untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan Tugas Pokok dan Fungsinya, sehingga dana yang tersedia untuk saat ini perlu ditingkatkan agar seluruh Personil baik Pegawai Negeri Sipil

(PNS) maupun tenaga kontrak diberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya.

- Sarana dan Prasarana yang menunjang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah masih minim, baik sarana dan prasarana seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk Patroli, angkutan mobilisasi anggota Satpol PP, kelengkapan anggota Satpol PP, gedung/ruangan yang memadai dan lain sebagainya.
- Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat merupakan bagian TUPOKSI dari Satuan Polisi Pamong Praja terutama dalam pengelolaan dan Pelaksanaan Program yang keseluruhannya Anggaran dibebankan melalui dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah yang relatif sangat minim untuk dapat mencapai target secara optimal. Hal ini sangat diperlukan atau diupayakan untuk mendapat anggaran yang bersumber dari APBN baik melalui dana dekonsentrasi maupun dana tugas pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, melalui program kegiatan yang ada di pusat dapat diupayakan untuk memenuhi target kinerja serta meningkatkan kinerja Aparatur serta pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada prinsipnya rancangan rencana kerja yang di buat tetap mengacu pada program dan kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan, kepentingan, dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yang di tuangkan dalam bentuk program antara lain :

- 1) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 2) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
- 3) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana strategik daerah Kabupaten/Kota secara jelas belum tentu mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi, hal ini mengingat adanya perbedaan tingkat prioritas pembangunan daerah masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya dan disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah secara umum memiliki kaitan tugas dan fungsi yang baik, namun program dan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota sebagian besar memiliki kesamaan program dan kegiatan yang sifatnya berjenjang baik dari tingkat pusat maupun sampai ke daerah. Secara hirarki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berkoordinasi dan konsultasi baik dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah maupun dengan Ditjen Bina Administrasi dan Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

a. Tujuan

Tujuan yang ingin diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya Pemeliharaan Ketenteraman dan ketertiban hukum dalam masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Kepala Daerah ;
2. Terciptanya kompetensi dan Profesionalisme Satpol PP;
3. Terciptanya kesadaran dan Partisipasi kemandirian Masyarakat untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban di lingkungannya;
4. Meningkatnya struktur kedisiplinan dan ketertiban umum dalam penyampaian aspirasi Penyakit Masyarakat (PEKAT);
5. Terciptanya pengembangan wawasan kebangsaan;
6. Terciptanya kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

7. Terciptanya rasa aman, tentram dan terlindungnya hak dan kewajiban Masyarakat;
8. Terkoordinasinya Potensi Linmas yang ada di Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.

b. Sasaran

Adapun sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran tujuan dimaksud adalah:

- 1) Masyarakat aman dan tentram dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- 2) Kompetensi dan profesionalisme Satpol PP terhadap Masyarakat;
- 3) Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi memelihara ketentraman dan ketertiban lingkungan;
- 4) Struktur disiplin dan ketertiban umum dalam penyampaian aspirasi Penyakit Masyarakat (PEKAT);
- 5) Pengembangan serta pemahaman masyarakat terhadap wawasan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- 6) Memelihara Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 7) Memelihara Keamanan, ketertiban dan ketenteraman serta perlindungan bagi masyarakat.
- 8) Partisipasi Masyarakat, Instansi terkait dalam Penyelenggaraan Program Perlindungan Masyarakat dan peran serta Linmas di Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2021 bersumber dari dana APBD Provinsi. Program/ kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi terdiri atas 2 (dua) Program, 6 (enam) Kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan.

1. Dana APBD Provinsi

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
	b. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan.
	c. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah.
	d. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
	b. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran.
3.	Administrasi Umum
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
	d. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah.
	e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
	f. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
	g. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
	h. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
	i. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
	j. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
	k. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
	l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
	m. Penyediaan Makanan dan Minuman.
	n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
	o. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	p. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4.	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
	b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

B. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
	a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
	b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada.
	c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
	d. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.
2.	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
	a. Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
	b. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (PD) Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 (terlampir dalam Tabel 4.1)

BAB V PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD) Tahun Anggaran 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.

Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berusaha merencanakan Program dan Kegiatan yang menjadi penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsinya. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD selama Tahun Anggaran 2021. Dengan berpedoman pada Rencana Kerja ini diharapkan ke depan, kualitas pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditingkatkan dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Palangka Raya, Agustus 2020.

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH'. The inner ring contains 'SATUAN POLISI PAMONG PRAJA'. A blue ink signature is written across the stamp. To the right of the stamp, the text reads: 'KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,' followed by the name 'BARU, S.Pd., M.Si.', the title 'Pembina Utama Muda', and the NIP number 'NIP. 19700228 199803 1 007'.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Provinsi Kalimantan Tengah

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				22.629.916.179		
1.05.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				485.527.500		
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyusunan program kerja SKPD	Kota Palangka Raya	2 dokumen	25.000.000	APBD	
1.05.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terpenuhinya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Kota Palangka Raya	3 dokumen	72.677.500	APBD	
1.05.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	6 dokumen	50.000.000	APBD	
1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 tahun	200.000.000	APBD	
1.05.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	2 dokumen / 1 tahun	137.850.000	APBD	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan				20.467.994.179		
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tertaksana pembayaran gaji dan bpjs PNS dan Tenaga Kontrak Satpol PP Prov Kalteng	Kota Palangka Raya	386 orang	20.449.744.179	APBD	
1.05.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Terpenuhinya Laporan realisasi keuangan semesteran	Kota Palangka Raya	2 dokumen	7.377.000	APBD	
1.05.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terpenuhinya pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palangka Raya	1 dokumen	10.873.000	APBD	
1.05.01.1.03	Administrasi Umum				1.526.394.500		
1.05.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya Surat Menyurat dan Pembelian Materai	Kota Palangka Raya	100 surat/paket	5.000.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.05.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan jasa, listrik, air, telepon dan Jaringan Internet	Kota Palangka Raya	3 rekening	271.200.000	APBD	
1.05.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palangka Raya	5 jenis	129.480.500	APBD	
1.05.01.1.03.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya Asuransi Gedung Kantor	Kota Palangka Raya	2 gedung	3.000.000	APBD	
1.05.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/ operasional	Kota Palangka Raya	24 stnk	40.000.000	APBD	
1.05.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya penyediaan jasa pengelola administrasi keuangan	Kota Palangka Raya	20 orang	481.310.000	APBD	
1.05.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya honor petugas kebersihan kantor dan perlengkapannya	Kota Palangka Raya	3 orang	111.404.000	APBD	
1.05.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terbayarnya biaya jasa service peralatan kantor	Kota Palangka Raya	5 jenis	50.000.000	APBD	
1.05.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alata Tulis Kantor	Kota Palangka Raya	50 jenis	35.000.000	APBD	
1.05.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya bahan cetak dan penggandaan	Kota Palangka Raya	7 jenis	15.000.000	APBD	
1.05.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan	Kota Palangka Raya	5 jenis	5.000.000	APBD	
1.05.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran bagi pegawai	Kota Palangka Raya	3 jenis	10.000.000	APBD	
1.05.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman Bagi Tamu kantor	Kota Palangka Raya	50 jenis	10.000.000	APBD	
1.05.01.1.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Provinsi	1 tahun	150.000.000	APBD	
1.05.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Kota Palangka Raya	24 unit	200.000.000	APBD	
1.05.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kota Palangka Raya	12 jenis	10.000.000	APBD	
1.05.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				150.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.05.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terselenggaranya pendataan Diksar di 14 Kabupaten/Kota dan Pembinaan Internal Kedisiplinan Anggota Satpol PP	Provinsi Kalimantan Tengah	1 dokumen / 12 bulan	100.000.000	APBD	
1.05.01.1.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur lainnya	Provinsi Kalimantan Tengah	20 kali	50.000.000	APBD	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				650.000.000		
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				425.000.000		
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya pengamanan VIP, aset dan pejabat-pejabat Pemprov Kalteng dan pengendalian unjuk rasa dan konflik sosial di masyarakat	Provinsi Kalimantan Tengah	120 orang/ 20 kali	145.000.000	APBD	
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Terlaksananya penegakan kantrantibmas di lingkungan masyarakat dan tersusunnya data-data pelanggaran Perda/Pergub Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	20 kali / 14 Kab/Kota	80.000.000	APBD	
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya kesadaran masyarakat di lingkungan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan kantibmas maupun bencana dan Tersedianya database anggota Linmas se-Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	50 orang / 1 dokumen	130.000.000	APBD	
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Terlatihnya anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kota Palangka Raya	50 orang	70.000.000	APBD	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				225.000.000		
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Pelaku usaha di Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 dokumen	100.000.000	APBD	
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terpenuhinya kegiatan penegakan perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dan Pengamanan Barang Bukti	Provinsi Kalimantan Tengah	14 Kab/Kota / 30 kali	125.000.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	JUMLAH TOTAL				23.279.916.179		

Rencana Tahun 2022	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(9)	(10)
	23.812.500.000
	635.000.000
2 dokumen	25.000.000
3 dokumen	100.000.000
6 dokumen	60.000.000
1 tahun	300.000.000
2 dokumen / 1 tahun	150.000.000
	21.018.500.000
386 orang	21.000.000.000
2 dokumen	7.500.000
1 dokumen	11.000.000
	1.859.000.000
100 surat/paket	5.000.000

Rencana Tahun 2022	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(9)	(10)
3 rekening	300.000.000
5 jenis	150.000.000
2 gedung	4.000.000
24 stnk	45.000.000
20 orang	500.000.000
3 orang	125.000.000
5 jenis	65.000.000
50 jenis	40.000.000
7 jenis	20.000.000
5 jenis	10.000.000
3 jenis	15.000.000
50 jenis	15.000.000
1 tahun	300.000.000
24 unit	250.000.000
12 jenis	15.000.000
	300.000.000

Rencana Tahun 2022	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(9)	(10)
1 dokumen / 12 bulan	150.000.000
20 kali	150.000.000
	1.350.000.000
	800.000.000
120 orang/ 20 kali	250.000.000
20 kali / 14 Kab/Kota	250.000.000
50 orang / 1 dokumen	150.000.000
50 orang	150.000.000
	550.000.000
1 dokumen	150.000.000
14 Kab/Kota / 30 kali	400.000.000

Rencana Tahun 2022	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(9)	(10)
	<i>25.162.500.000</i>

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Provinsi Kalimantan Tengah

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05 - 1.5.0201 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				12.834.072.500				14.464.760.075
1.05 - 1.5.0201 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya Surat Menyurat dan Pembelian Materai	Kota Palangka Raya	100 Surat/Paket	5.000.000	APBD		100 Surat/Paket	5.750.000
1.05 - 1.5.0201 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan jasa, listrik, air, telepon dan Jaringan Internet	Kota Palangka Raya	3 Rekening	271.200.000	APBD		3 Rekening	311.880.000
1.05 - 1.5.0201 - 1.3	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palangka Raya	5 Jenis	129.480.500	APBD		11 Jenis	148.902.575
1.05 - 1.5.0201 - 1.5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terbayarnya Asuransi Gedung Kantor	Kota Palangka Raya	2 gedung	3.000.000	APBD		2 gedung	3.450.000
1.05 - 1.5.0201 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak kendaraan Dinas/operasional	Kota Palangka Raya	24 stnk	40.000.000	APBD		24 stnk	46.000.000
1.05 - 1.5.0201 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya penyediaan jasa pengelola administrasi keuangan	Kota Palangka Raya	20 orang	481.310.000	APBD		20 orang	580.000.000
1.05 - 1.5.0201 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya honor petugas kebersihan kantor dan perlengkapannya	Kota Palangka Raya	3 orang	111.404.000	APBD		3 orang	130.000.000
1.05 - 1.5.0201 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terbayarnya biaya jasa service peralatan kantor	Kota Palangka Raya	5 jenis	50.000.000	APBD		6 jenis	57.500.000
1.05 - 1.5.0201 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alata Tulis Kantor	Kota Palangka Raya	50 Jenis	35.000.000	APBD		50 Jenis	40.250.000
1.05 - 1.5.0201 - 1.11	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya bahan cetak dan penggandaan	Kota Palangka Raya	7 Jenis	15.000.000	APBD		7 Jenis	17.250.000
1.05 - 1.5.0201 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianyanya komponen instalasi listrik/penerangan	Kota Palangka Raya	5 Jenis	5.000.000	APBD		5 Jenis	5.750.000
1.05 - 1.5.0201 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran bagi pegawai	Kota Palangka Raya	3 Jenis	10.000.000	APBD		3 Jenis	11.500.000
1.05 - 1.5.0201 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman Bagi Tamu kantor	Kota Palangka Raya	100 Jenis	10.000.000	APBD		100 Jenis	11.500.000
1.05 - 1.5.0201 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Provinsi	1 tahun	150.000.000	APBD		1 tahun	172.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05 - 1.5.0201 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 tahun	200.000.000	APBD		1 tahun	230.000.000
1.05 - 1.5.0201 - 1.38	Rapat Koordinasi / Konsultasi / Rakernis	Terpenuhinya rapat koordinasi /konsultasi/rakernis Pol PP 14 Kab/kota	Provinsi Kalimantan Tengah	1 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen/ 60 orang	400.000.000
1.05 - 1.5.0201 - 1.70	Penyediaan jasa tenaga kontrak	Terlaksana pembayaran gaji dan bpjs tenaga kontrak Satpol PP Prov Kalteng	Kota Palangka Raya	311 Orang	11.169.828.000	APBD		311 Orang	12.180.000.000
1.05 - 1.5.0201 - 1.71	Pengembangan dan pengelolaan website	Terlaksana Media Informasi online Satpol PP Prov.Kalteng yang up to date	Kota Palangka Raya	1 dokumen	97.850.000	APBD		1 dokumen	112.527.500
1.05 - 1.5.0201 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				210.000.000				941.500.000
1.05 - 1.5.0201 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Kota Palangka Raya	24 unit	200.000.000	APBD		24 unit	230.000.000
1.05 - 1.5.0201 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kota Palangka Raya	12 jenis	10.000.000	APBD		12 jenis	11.500.000
1.05 - 1.5.0201 - 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				50.000.000				57.500.000
1.05 - 1.5.0201 - 3.14	Koordinasi dan Kerjasama Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lainnya	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur lainnya	Provinsi Kalimantan Tengah	20 kali	50.000.000	APBD		20 kali	57.500.000
1.05 - 1.5.0201 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100.000.000				152.500.000
1.05 - 1.5.0201 - 5.116	Pendataan Kebutuhan Pelatihan Dasar	Terselenggaranya pendataan Diksar di 14 Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	1 dokumen	50.000.000	APBD		1 dokumen	57.500.000
1.05 - 1.5.0201 - 5.147	Pembinaan kedisiplinan anggota Satpol PP	Terselenggaranya Pembinaan Internal Kedisiplinan Anggota Satpol PP	Kota Palangka Raya	12 bulan	50.000.000	APBD		12 bulan	95.000.000
1.05 - 1.5.0201 - 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				155.927.500				179.316.625
1.05 - 1.5.0201 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terpenuhinya Laporan realisasi keuangan semesteran	Kota Palangka Raya	2 dokumen	7.377.000	APBD		2 dokumen	8.483.550
1.05 - 1.5.0201 - 6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terpenuhinya pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palangka Raya	1 dokumen	10.873.000	APBD		1 dokumen	12.503.950
1.05 - 1.5.0201 - 6.6	Penyusunan RKA-SKPD	Terpenuhinya Penyusunan RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	2 dokumen	22.677.500	APBD		2 dokumen	26.079.125

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05 - 1.5.0201 - 6.14	Penyusunan LAKIP	Terpenuhinya Penyusunan LAKIP dalam capaian Kinerja	Kota Palangka Raya	4 dokumen	30.000.000	APBD		4 dokumen	34.500.000
1.05 - 1.5.0201 - 6.15	Penyusunan Renja SKPD	Terpenuhinya Penyusunan program kerja SKPD	Kota Palangka Raya	2 dokumen	25.000.000	APBD		2 dokumen	28.750.000
1.05 - 1.5.0201 - 6.35	Penyusunan LKPJ dan LPPD	Terpenuhinya Penyusunan laporan LKPJ dan LPPD SKPD	Kota Palangka Raya	2 dokumen	20.000.000	APBD		2 dokumen	23.000.000
1.05 - 1.5.0201 - 6.67	Pembinaan Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah (PPID) Pembantu	Terwujudnya PPID Pembantu di Sat Pol PP Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	1 tahun	40.000.000	APBD		1 tahun	46.000.000
1.05 - 1.5.0201 - 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				300.000.000				644.750.000
1.05 - 1.5.0201 - 15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlatihnya anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kota Palangka Raya	50 orang	70.000.000	APBD		120 orang	325.000.000
1.05 - 1.5.0201 - 15.23	Pemberdayaan Sistem Keamanan Lingkungan	Terciptanya kesadaran masyarakat di lingkungan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan kantibmas maupun bencana	Kota Palangka Raya	2 dokumen	65.000.000	APBD		2 dokumen	125.000.000
1.05 - 1.5.0201 - 15.29	Pembuatan Database anggota linmas	tersedianya data base anggota linmas sekalimantan tengah	Kota Palangka Raya	1 dokumen	65.000.000	APBD		1 dokumen	74.750.000
1.05 - 1.5.0201 - 15.34	Pembinaan Pelaku Usaha	Pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya	Provinsi Kalimantan Tengah	20 lokasi	100.000.000	APBD		20 lokasi	120.000.000
1.05 - 1.5.0201 - 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal				350.000.000				917.250.000
1.05 - 1.5.0201 - 16.1	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	Terbayarnya honorarium jaga/pengamanan VIP, aset dan pejabat-pejabat Pemprov Kalteng	Kota Palangka Raya	120 orang	115.000.000	APBD		120 orang	132.250.000
1.05 - 1.5.0201 - 16.8	Penegakan pelaksanaan perda/pegub di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah	Terpenuhinya kegiatan penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	14 kab/kota	100.000.000	APBD		14 kab/kota	115.000.000
1.05 - 1.5.0201 - 16.24	Inventarisasi Data Perundangan/Perda/Pergub	Tersusunnya data-data Perda/Pergub Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	14 kab/kota	50.000.000	APBD		14 kab/kota	100.000.000
1.05 - 1.5.0201 - 16.29	Pengendalian Unjuk Rasa dan Konflik Sosial	Terlaksananya pengendalian Unjuk Rasa dan Konflik Sosial di masyarakat	Provinsi Kalimantan Tengah	20 kali	30.000.000	APBD		20 kali	200.000.000
1.05 - 1.5.0201 - 16.30	Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Terlaksananya penegakan kantrantibmas di lingkungan masyarakat	Provinsi Kalimantan Tengah	20 kali	30.000.000	APBD		20 kali	200.000.000
1.05 - 1.5.0201 - 16.29	Pengamanan Barang Bukti	Terlaksananya pengamanan barang bukti di TKP	Provinsi Kalimantan Tengah	30 kali	25.000.000	APBD		30 kali	170.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<i>JUMLAH TOTAL</i>				14.000.000.000				17.357.576.700